RENCANA KERJA

BAPPEDA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, yang pelaksanaannya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika pembangunan daerah-nasional.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan diantaranya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, Rensta Perangkat Daerah dan RPJMD. Rencana Kerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dan untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 memuat Kebijakan Pembangunan, Sasaran, Uraian Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2024, kerangka pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program yang pendanaannya langsung dilaksanakan oleh Bappeda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mekanisme dan proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD, selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah menjabarkan seluruh rencana yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaras dengan rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selain itu juga untuk menyediakan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengoperasionalkan program/ kegiatan yang efektif, efisien dan terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kediri

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat *input, outcome* dan *output* Bappeda tahun 2023. *Input* dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada

evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2023 dan realisasi Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Keg Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd. Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10 = 5+7+9	11 =10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%	92,52%	92,52%	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	98,97	100	94,05%	94,05%	100	199,91%	199,91%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	100%	100,00	100	95,26%	95,26%	100	200,95%	200,95%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen rencana program dan kegiatan yang disusun	100%	99,78	100	99,88%	99,88%	100	200,78%	200,78%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	100%	96,41	100	95,86%	95,86%	100	197,37%	197,37%

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	100%	98,52	100	84,46%	84,46%	100	199,36%	199,36%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	100%	99,17	100	98,70%	98,70%	100	200,16%	200,16%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD yang tersusun	100%	99,92	100	99,98%	99,98%	100	200,92%	200,92%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100%	99,05	100	87,75%	87,75%	100	199,93%	199,93%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	98,29	100	93,06%	93,06%	100	199,22%	199,22%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu ASN menerima gaji dan tunjangan	100%	0,00	100	92,73%	92,73%	100	100,93%	100,93%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah tenaga non ASN yang mendapatkan gaji	100%	98,13	100	95,75%	95,75%	100	199,09%	199,09%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun yang disusun	100%	99,95	100	100,00%	100,00%	100	200,95%	200,95%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	100%	99,98	100	100,00%	100,00%	100	200,98%	200,98%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ semester yang disusun	100%	99,05	100	99,86%	99,86%	100	200,05%	200,05%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	97,48	100	96,85%	96,85%	100	198,45%	198,45%
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD SKPD	100%	98,29	100	91,64%	91,64%	100	199,21%	199,21%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan BMD SKPD	100%	97,33	100	9877,00%	9877,00%	100	296,10%	296,10%
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan pemanfaatan BMD SKPD	100%	96,86	100	99,14%	99,14%	100	197,85%	197,85%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	92,78	100	94,56%	94,56%	100	193,73%	193,73%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur	100%	0,00	100	91,87%	91,87%	100	100,92%	100,92%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	99,41	100	96,37%	96,37%	100	200,37%	200,37%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	100%	91,66	100	94,03%	94,03%	100	192,60%	192,60%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	99,77	100	99,19%	99,19%	100	200,76%	200,76%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu pemenuhan peralatan rumah tangga	100%	100,00	100	35,81%	35,81%	100	200,36%	200,36%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	99,99	100	97,80%	97,80%	100	200,97%	200,97%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu penyelenggaraan rapat koord dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan	100%	99,74	100	99,59%	99,59%	100	200,74%	200,74%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen penatausahaan arsip dinamis	100%	99,96	100	99,57%	99,57%	100	200,96%	200,96%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Updating Aplikasi	100%	0,00	100	0,00%	0,00%	100	100,00%	100,00%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	91,94	100	92,73%	92,73%	100	192,87%	192,87%
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya barang milik daerah	100%	91,94	100	92,73%	92,73%	100	192,87%	192,87%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	98,46	100	62,78%	62,78%	100	199,09%	199,09%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu pemenuhan jasa surat menyurat	100%	100,00	100	100,00%	100,00%	100	201,00%	201,00%

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, Air dan Listrik	100%	96,59	100	53,14%	53,14%	100	197,12%	197,12%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	98,56	100	61,57%	61,57%	100	199,18%	199,18%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan dan alat kebersihan	100%	99,76	100	99,98%	99,98%	100	200,76%	200,76%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0%	99,27	100	92,07%	92,07%	99	199,19%	#DIV/0!
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	99,27	100	92,07%	92,07%	100	200,19%	200,19%
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100%	99,32	100	96,80%	96,80%	100	200,29%	200,29%
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Identifikasi Permasalahan	100%	98,98	100	99,75%	99,75%	100	199,98%	199,98%

					Pembangunan Daerah								
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dok Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	98,28	100	97,70%	97,70%	100	199,26%	199,26%
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	100%	94,34	100	92,89%	92,89%	100	195,27%	195,27%
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum SKPD yang dilaksanakan	100%	96,17	100	100,00%	100,00%	100	197,17%	197,17%
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	100%	99,96	100	94,60%	94,60%	100	200,91%	200,91%
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	99,71	100	96,24%	96,24%	100	200,67%	200,67%
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	98,98	100	91,78%	91,78%	100	199,90%	199,90%
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dok Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. Daerah	100%	99,32	100	97,56%	97,56%	100	200,30%	200,30%

				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi daerah	100%	98,12	100	85,84%	85,84%	100	198,98%	198,98%
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan Daerah	100%	94,63	100	90,53%	90,53%	100	195,54%	195,54%
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	97,40	100	92,00%	92,00%	100	198,32%	198,32%
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	98,87	100	92,43%	92,43%	100	199,79%	199,79%
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah	100%	91,78	100	91,59%	91,59%	100	192,70%	192,70%
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	95,01	100	97,15%	97,15%	100	195,98%	195,98%
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan	100%	99,09	100	99,67%	99,67%	100	200,09%	200,09%

					perangkat daerah bidang pemerintahan								
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan	100%	81,46	100	98,69%	98,69%	100	182,45%	182,45%
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Waktu pemrosesan usulan BTT	100%	93,82	100	93,09%	93,09%	100	194,75%	194,75%
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen kajian terkait bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang pembangunan manusia	100%	98,76	100	99,04%	99,04%	100	199,75%	199,75%
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Pembangunan Manusia	100%	75,10	100	95,59%	95,59%	100	176,06%	176,06%

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dok hasil koord Bidang Pembangunan Manusia	100%	95,06	100	98,34%	98,34%	100	196,04%	196,04%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	97,81	100	97,39%	97,39%	100	198,78%	198,78%
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pendukung perencanaan bidang Perekonomian	100%	98,81	100	99,94%	99,94%	100	199,81%	199,81%
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Bidang Perekonomian	100%	85,77	100	80,49%	80,49%	100	186,57%	186,57%
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dok koordinasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100%	94,80	100	95,24%	95,24%	100	195,75%	195,75%
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pendukung perencanaan bidang SDA	100%	98,73	100	99,85%	99,85%	100	199,73%	199,73%

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang SDA	100%	95,03	100	97,97%	97,97%	100	196,01%	196,01%
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dok koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDA	100%	96,03	100	93,68%	93,68%	100	196,97%	196,97%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	90,63	100	99,66%	99,66%	100	191,63%	191,63%
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur	100%	99,76	100	99,95%	99,95%	100	200,76%	200,76%
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monev Bidang Infrastruktur	100%	94,09	100	97,70%	97,70%	100	195,07%	195,07%
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	100%	99,01	100	99,51%	99,51%	100	200,01%	200,01%
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Kewilayahan	100%	99,27	100	99,74%	99,74%	100	200,27%	200,27%

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monev Bidang Kewilayahan	100%	99,26	100	97,58%	97,58%	100	200,24%	200,24%
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	100%	99,26	100	100,00%	100,00%	100	200,26%	200,26%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Target) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	13	14
1	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan dan ketersediaan data informasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	95%	95%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	
2			Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	95%	95%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	
3			Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat, provinsi maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Kabupaten Kediri dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Kediri sebagai perencana, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Peningkatan kualitas hasil analisa, telaahan, kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas ada fungsi, dapat diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

1. belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja;
2. masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3. sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal;
4. sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2024 di dasarkan kepada hal-hal berikut :

1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan kedalam indikator sasaran agar dapat dicapai selama 5 tahun kedepan dari tahun 2021-2026.
2. Program prioritas dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan tahun 2024 berdasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026 pada rencana tahun 2024.
4. Permasalahan mendesak dan isu strategis pada tahun 2024.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja PD telah ditetapkan bahwa Program dan Kegiatan tahun 2024, terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.570.423.015,- yang bersumber dari Dana DAU dan Pajak Rokok.

Setelah dilakukan analisa kebutuhan dana untuk program/ kegiatan maka kebutuhan anggarannya berkurang menjadi Rp. 8.260.743.800,000. Pengurangan tersebut sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel : 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,000	12
					8.570.423.015					8.260.743.800	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.343.689.728	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.034.010.513	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.054.803	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				8.054.803	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dok	2.224.329	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun		2.224.329	

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ngasem	jumlah dokumen rencana program dan kegiatanyang disusun	1 Dok	1.492.173	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ngasem	jumlah dokumen rencana program dan kegiatanyang disusun		1.492.173	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ngasem	dokumen RKA SKPD	1 Dok	1.004.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ngasem	dokumen RKA SKPD		1.004.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ngasem	dokumen DPA SKPD	1 Dok	996.211	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ngasem	dokumen DPA SKPD		996.211	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Ngasem	dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	798.090	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Ngasem	dokumen Perubahan DPA SKPD		798.090	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ngasem	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ngasem	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD yang tersusun		630.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ngasem	1. jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yangdisusun 2. jumlah monitoring	2 Dok	910.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ngasem	1. jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yangdisusun 2. jumlah monitoring		910.000	

			dan evaluasi kinerja yangdilaksanakan					dan evaluasi kinerja yangdilaksanakan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.956.697.841	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				4.648.846.175	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngasem	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 bulan	4.584.798.266	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngasem	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		4.276.946.600	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ngasem	jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlahtenaga non PNS yang menerima gaji jumlah tenaga adm yang mendapat honor	12 bulan	359.015.056	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ngasem	jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlahtenaga non PNS yang menerima gaji jumlah tenaga adm yang mendapat honor		359.015.056	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ngasem	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dok	2.921.853	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ngasem	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		2.921.853	

11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Ngasem	Dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	1 Dok	3.360.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Ngasem	Dokumen hasil tanggapan pemeriksaan		3.360.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Ngasem	jumlah laporan keuangan bulanan/ semester yangdisusun	14 Dok	6.602.666	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Ngasem	jumlah laporan keuangan bulanan/ semester yangdisusun		6.602.666	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.912.420	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				8.912.420	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ngasem	dokumen BMD SKPD	1 Dok	2.978.010	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ngasem	dokumen BMD SKPD		2.978.010	
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ngasem	dokumen BMD SKPD	1 Dok	3.050.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ngasem	dokumen BMD SKPD		3.050.000	
15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Ngasem	dokumen BMD SKPD	1 Dok	2.884.410	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Ngasem	dokumen BMD SKPD		2.884.410	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				0	
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Ngasem	jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur	1 kali	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Ngasem	jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur		0	

17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ngasem	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ngasem	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		0	
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ngasem	jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	1 kali	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ngasem	jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan		0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				104.066.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				302.390.720	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Ngasem	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 paket	3.594.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Ngasem	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		198.324.720	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ngasem	jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan barang	1 paket	8.775.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ngasem	jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan barang		3.594.000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngasem	jumlah koordinasi dan konsultasi kelembaggan diluar daerah yang dilaksanakan	12 bulan	81.947.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngasem	jumlah koordinasi dan konsultasi kelembaggan diluar daerah yang dilaksanakan		8.775.000	

22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ngasem	Dokumen penatausahaan arsip dinamis	1 Dok	9.750.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ngasem	Dokumen penatausahaan arsip dinamis		81.947.000	
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Ngasem	Updating Aplikasi	2 data	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Ngasem	Updating Aplikasi		9.750.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.670.900	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				13.670.900	
24	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Ngasem	Tersedianya barang milik daerah	1 paket	13.670.900	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Ngasem	Tersedianya barang milik daerah		13.670.900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.287.764	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				27.135.495	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ngasem	jumlah surat menyurat yang tertangani	12 bulan	700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ngasem	jumlah surat menyurat yang tertangani		700.000	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ngasem	jumlah dokumen pelaks penyediaan komunikasi	12 bulan	23.270.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ngasem	jumlah dokumen pelaks penyediaan komunikasi		21.442.451	

27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ngasem	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan yang diperbaiki	12 bulan	198.324.720	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ngasem	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan yang diperbaiki		4.993.044	
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ngasem	jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan	12 bulan	4.993.044	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ngasem	jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan		0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				25.000.000	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ngasem	jumlah kendaraan dinas/ operasional yangdipelihara jumlah kendaraan operasional yang terfasilitasiizinnya	6 roda 4 dan 22 roda 2	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ngasem	jumlah kendaraan dinas/ operasional yangdipelihara jumlah kendaraan operasional yang terfasilitasiizinnya		25.000.000	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.328.533.287	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				1.328.533.287	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.214.210.410	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				1.214.210.410	
30	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	4 dok	77.600.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah		77.600.000	
31	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kec. Ngasem	Jumlah dok Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dok	14.155.598	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kec. Ngasem	Jumlah dok Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		14.155.598	
32	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kec. Ngasem	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	1 Dok	45.576.305	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kec. Ngasem	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan		45.576.305	
33	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kec. Ngasem	Jumlah forum SKPD yang dilaksanakan	1 Dok	6.656.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kec. Ngasem	Jumlah forum SKPD yang dilaksanakan		6.656.000	
34	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	1 Dok	383.664.782	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan		383.664.782	

35	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dok	686.557.725	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		686.557.725	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				75.610.522	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				75.610.522	
36	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah Dok Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. Daerah	5 dok	6.882.937	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah Dok Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. Daerah		6.882.937	
37	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen data dan informasi daerah	1 dok	56.968.130	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen data dan informasi daerah		56.968.130	
38	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen profil pembangunan Daerah	1 dok	11.759.455	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen profil pembangunan Daerah		11.759.455	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				38.712.355	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				38.712.355	

39	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah Dok Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 dok	18.554.420	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kec. Ngasem	Jumlah Dok Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		18.554.420	
40	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah	4 dok	20.157.935	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	Jumlah laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah		20.157.935	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.898.200.000	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				1.898.200.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				600.000.000	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				600.000.000	
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kec. Ngasem	Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	2 dok	145.608.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kec. Ngasem	Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan		145.608.000	

42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kec. Ngasem	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan	1 dok	54.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kec. Ngasem	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan		54.500.000	
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kec. Ngasem	Waktu pemrosesan usulan BTT	1 dok	275.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kec. Ngasem	Waktu pemrosesan usulan BTT		275.000.000	
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen kajian terkait bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang pembangunan manusia	2 dok	21.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen kajian terkait bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang pembangunan manusia		21.500.000	
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Pembangunan Manusia	1 dok	36.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Pembangunan Manusia		36.000.000	

46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	Jumlah dok hasil koord Bidang Pembangunan Manusia	1 dok	67.392.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	Jumlah dok hasil koord Bidang Pembangunan Manusia		67.392.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				600.000.000	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				600.000.000	
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kec. Ngasem	jumlah dokumen perencanaan bidang Ekonomi	2 dok	304.816.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kec. Ngasem	jumlah dokumen perencanaan bidang Ekonomi		304.816.000	
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kec. Ngasem	jumlah dokumen monitoring dan evalusi	1 Dok	15.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kec. Ngasem	jumlah dokumen monitoring dan evalusi		15.000.000	
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kec. Ngasem	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	1 Dok	123.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kec. Ngasem	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA		123.200.000	

50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kec. Ngasem	jumlah dokumen perencanaan bidang Ekonomi	2 dok	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kec. Ngasem	jumlah dokumen perencanaan bidang Ekonomi		0,000	
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kec. Ngasem	jumlah dokumen monitoring dan evalusi jumlah dokumen monitoring dan evalusi	1 Dok	18.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kec. Ngasem	jumlah dokumen monitoring dan evalusi jumlah dokumen monitoring dan evalusi		18.000.000	
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kec. Ngasem	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	1 Dok	138.984.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kec. Ngasem	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA		138.984.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				698.200.000	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				698.200.000	
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur	2 dok	200.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur		200.000.000	

54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Monev Bidang Infrastruktur	1 Dok	42.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Monev Bidang Infrastruktur		42.500.000	
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Dok	123.750.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur		123.750.000	
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Kewilayahan	2 dok	200.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Kewilayahan		200.000.000	
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Monev Bidang Kewilayahan	1 Dok	42.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Monev Bidang Kewilayahan		42.500.000	
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	1 Dok	89.450.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan		89.450.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel : 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Bappeda

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan Kebijakan Nasional Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diamanatkan dalam peraturan tersebut bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dimana proses perencanaan belanja dan pembiayaan melalui konsultasi dengan para pakar. Pendekatan partisipatif dimana proses perencanaan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang. Pendekatan *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dimana proses perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan

pendekatan *top-down* dimana proses perencanaan pembangunan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri 2005 – 2025 :

Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah dimuat dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRW, RPJMD, Renstra dan RKPD. RPJPD Kabupaten Kediri memuat:

Visi : Kabupaten Kediri yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS).

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kualitas Struktur Perekonomian yang Ditunjang dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Keahlian Tenaga Kerja Terampil di Bidang Agribisnis, Pariwisata, Perdagangan dan Teknologi;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Terpenuhinya Kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.

3.2.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri 2021 - 2026

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 memuat:

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani.

Misi :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah.
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan.
5. Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah.
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal.
7. Optimalisasi tata Kelola lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan mitigasi bencana.
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda.
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan jangka menengah daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 diarahkan pada :

1) Pembangunan Ekonomi;
2) Pembangunan konektivitas;
3) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4) Pembangunan Karakter;
5) Pembangunan Infrastruktur;
6) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
7) Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Bappeda perlu merumuskan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. Tujuan penyusunan Renja Bappeda adalah meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan adalah penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diharapkan setiap tahun mengalami peningkatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Adapun sasaran pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kediri adalah (Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan dan ketersediaan data informasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan) dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD;
2. Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra);
3. Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Program dan Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

Sub Kegiatan :

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Sub Kegiatan :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Kegiatan :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Tabel : 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8.260.743.800				17.247.996.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.034.010.513				7.955.547.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.054.803				95.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan P-Renja yang disusun	Kec. Ngasem	2 Dok	2.224.329	APBD		2 Dok	15.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen rencana program dan kegiatan yang disusun	Kec. Ngasem	1 Dok	1.492.173	APBD		1 Dok	12.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD	Kec. Ngasem	1 Dok	1.004.000	APBD		1 Dok	11.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	Kec. Ngasem	1 Dok	996.211	APBD		1 Dok	11.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Ngasem	1 Dok	798.090	APBD		1 Dok	11.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD yang tersusun	Kec. Ngasem	1 Dok	630.000	APBD		1 Dok	15.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yangdisusun 2. jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja yangdilaksanakan	Kec. Ngasem	2 Dok	910.000	APBD		2 Dok	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.648.846.175				6.501.547.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu pelaks keg ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kec. Ngasem	12 bulan	4.276.946.600	APBD		12 bulan	5.529.047.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu pelaks kegiatan dan jumlah non asn yang mendapat gaji	Kec. Ngasem	12 bulan	359.015.056	APBD		12 bulan	900.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kec. Ngasem	1 Dok	2.921.853	APBD		1 Dok	8.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	Kec. Ngasem	1 Dok	3.360.000	APBD		1 Dok	12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ semester yangdisusun	Kec. Ngasem	14 Dok	6.602.666	APBD		14 Dok	52.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.912.420				20.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan BMD SKPD	Kec. Ngasem	1 Dok	2.978.010	APBD		1 Dok	7.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen BMD SKPD	Kec. Ngasem	1 Dok	3.050.000	APBD		1 Dok	6.000.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pemanfaatan BMD SKPD	Kec. Ngasem	1 Dok	2.884.410	APBD		1 Dok	7.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-				137.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	waktu pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur	Kec. Ngasem	1 kali		APBD		1 kali	75.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	waktu sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kec. Ngasem	1 kali		APBD		1 kali	12.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	waktu bimtek implementasi peraturan	Kec. Ngasem	1 kali		APBD		1 kali	50.000.000

		perundang-undangan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.390.720				903.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Ngasem	1 paket	198.324.720	APBD		1 paket	20.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Ngasem	1 paket	3.594.000	APBD		1 paket	3.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Ngasem	12 bulan	8.775.000	APBD		12 bulan	70.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngasem	1 Dok	81.947.000	APBD		1 Dok	700.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ngasem	1 dok	9.750.000	APBD		2 data	110.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.670.900				15.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya barang milik daerah	Kec. Ngasem	1 paket	13.670.900	APBD		1 paket	15.000.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.135.495	APBD			196.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu pemenuhan jasa surat menyurat	Kec. Ngasem	12 bulan	700.000	APBD		12 bulan	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, Air dan Listrik	Kec. Ngasem	12 bulan	21.442.451	APBD		12 bulan	25.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Ngasem	12 bulan	4.993.044	APBD		12 bulan	140.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan dan alat kebersihan	Kec. Ngasem			APBD		12 bulan	30.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.000.000				100.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpeliharan dan yang terfasilitasi perizinannya	Kec. Ngasem	6 roda 4 dan 22 roda 2	25.000.000	APBD		6 roda 4 dan 22 roda 2	100.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.328.533.287				4.724.454.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.214.210.410				2.725.000.000
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Identifikasi Permasalahan	Kec. Ngasem	4 dok	77.600.000	APBD	-	4 dok	800.000.000

		Pembangunan Daerah							
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dok Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	1 dok	14.155.598	APBD		1 dok	300.000.000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	Kec. Ngasem	1 Dok	45.576.305	APBD		1 Dok	200.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum SKPD yang dilaksanakan	Kec. Ngasem	1 Dok	6.656.000	APBD		1 Dok	200.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Kec. Ngasem	1 Dok	383.664.782	APBD		1 Dok	475.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kec. Ngasem	3 dok	686.557.725	APBD		3 dok	750.000.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				75.610.522				1.199.454.000
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dok Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. Daerah	Kec. Ngasem	5 dok	6.882.937	APBD		5 dok	650.000.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi daerah	Kec. Ngasem	1 dok	56.968.130	APBD		1 dok	375.000.000

	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	1 dok	11.759.455	APBD		1 dok	174.454.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				38.712.355				800.000.000
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ngasem	2 dok	18.554.420	APBD		2 dok	450.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah	Kec. Ngasem	4 dok	20.157.935	APBD		4 dok	350.000.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.898.200.000				4.567.995.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				600.000.000				1.440.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Kec. Ngasem	2 dok	145.608.000	APBD		2 dok	300.000.000

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan	Kec. Ngasem	1 dok	54.500.000	APBD		1 dok	90.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Waktu pemrosesan usulan BTT	Kec. Ngasem	1 dok	275.000.000	APBD		1 dok	350.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen kajian terkait bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang pembangunan manusia	Kec. Ngasem	2 dok	21.500.000	APBD		2 dok	300.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	1 dok	36.000.000	APBD		1 dok	100.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dok hasil koord Bidang Pembangunan Manusia	Kec. Ngasem	1 dok	67.392.000	APBD		1 dok	300.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				600.000.000				1.550.000.000

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen perencanaan bidang Ekonomi	Kec. Ngasem	2 dok	304.816.000	APBD		2 dok	400.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen monitoring dan evalusi	Kec. Ngasem	1 Dok	15.000.000	APBD		1 Dok	175.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	Kec. Ngasem	1 Dok	123.200.000	APBD		1 Dok	250.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah dokumen perencanaan bidang Ekonomi	Kec. Ngasem	2 dok	-	APBD		2 dok	200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah dokumen monitoring dan evalusi jumlah dokumen monitoring dan evalusi	Kec. Ngasem	1 Dok	18.000.000	APBD		1 Dok	250.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	Kec. Ngasem	1 Dok	138.984.000	APBD		1 Dok	275.000.000

	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				698.200.000				1.577.995.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	2 dok	200.000.000	APBD		2 dok	300.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monev Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	1 Dok	42.500.000	APBD		1 Dok	200.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Kec. Ngasem	1 Dok	123.750.000	APBD		1 Dok	300.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	2 dok	200.000.000	APBD		2 dok	300.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monev Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	1 Dok	42.500.000	APBD		1 Dok	250.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	Kec. Ngasem	1 Dok	89.450.000	APBD		1 Dok	227.995.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 terdiri dari 3 program 14 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan sebagaimana table 4.1 berikut:

Tabel : 4.1
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp).
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.054.803
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan P-Renja yang disusun	2.224.329
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen rencana program dan kegiatan yang disusun	1.492.173
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD	1.004.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	996.211
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen Perubahan DPA SKPD	798.090
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD yang tersusun	630.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yangdisusun 2. jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja yangdilaksanakan	910.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.648.846.175
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu pelaks keg ASN yang menerima gaji dan tunjangan	4.276.946.600
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu pelaks kegiatan dan jumlah non asn yang mendapat gaji	359.015.056
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2.921.853
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	3.360.000
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ semester yangdisusun	6.602.666
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		8.912.420
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen BMD SKPD	2.978.010
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen BMD SKPD	3.050.000
15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen BMD SKPD	2.884.410
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		302.390.720

19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	198.324.720
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.594.000
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.775.000
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.947.000
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.750.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.670.900
24	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya barang milik daerah	13.670.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.135.495
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang tertangani	700.000
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah dokumen pelaks penyediaan komunikasi	21.442.451
27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan yang diperbaiki	4.993.044
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.000.000
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/ operasional yangdipelihara jumlah kendaraan operasional yang terfasilitasiizinnya	25.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.328.533.287
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.214.210.410
30	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	77.600.000
31	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dok Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14.155.598
32	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	45.576.305
33	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum SKPD yang dilaksanakan	6.656.000
34	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	383.664.782

35	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	686.557.725
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		75.610.522
36	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dok Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. Daerah	6.882.937
37	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi daerah	56.968.130
38	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan Daerah	11.759.455
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		38.712.355
39	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	18.554.420
40	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah	20.157.935
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.898.200.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		600.000.000
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	145.608.000
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan	54.500.000
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Waktu pemrosesan usulan BTT	275.000.000
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen kajian terkait bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang pembangunan manusia	21.500.000
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Pembangunan Manusia	36.000.000
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dok hasil koord Bidang Pembangunan Manusia	67.392.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		600.000.000
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen perencanaan bidang Ekonomi	304.816.000

48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen monitoring dan evalusi	15.000.000
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	123.200.000
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah dokumen monitoring dan evalusi jumlah dokumen monitoring dan evalusi	18.000.000
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	waktu terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	138.984.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		698.200.000
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur	200.000.000
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monev Bidang Infrastruktur	42.500.000
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	123.750.000
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Kewilayahan	200.000.000
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monev Bidang Kewilayahan	42.500.000
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	89.450.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024 merupakan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dokumen RPJMD 2021-2026 dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021-2026. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, 2023
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MOCH. SALEH UDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650318 199003 1 005

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA